

**PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2014 DI MEDIA ASING
(Studi Kasus New York Times)**

Alia Azmi

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang

Abstract

The increasing intensity of international relations and globalization has spurred interests in local events of not only domestic audience but also foreign audience. Some events have become the interest of the public in other countries that the foreign media publish news about the events. The media cover events in a foreign country because the events will influence the government's foreign policy toward that country. Presidential election leads to the replacement of a country's leader. Meanwhile, a country's international relations and foreign policy are influenced by decision making individual such as state and government leader. Personalities, perceptions, activities, and leadership style of the leader influence foreign policy of a country, therefore different leader will make different foreign policy. Indonesian presidential election is covered by foreign media particularly those in countries with good relations with Indonesia. Some Americans pay attention to Indonesian presidential election because it will affect the two countries' bilateral relation. The New York Times, the most referred print and digital media by American foreign policy makers, also covered the election. Covering the two presidential candidates' background, the New York Times encouraged the American government to cooperate fully with whoever would be elected, and continue good relation with Indonesia.

Key words: *foreign media coverage, foreign policy, Indonesia presidential election*

Abstrak

Intensitas hubungan internasional dan globalisasi yang meningkat menyebabkan peristiwa di suatu negara menarik perhatian tidak hanya masyarakat negara tersebut tetapi juga masyarakat di negara lain. Peristiwa di negara lain adakalanya juga menjadi kepentingan warga suatu negara sehingga media meliput berita di negara lain tersebut. Peristiwa di luar negeri diliput media karena dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah terhadap negara lain itu. Pemilihan presiden akan menghasilkan pergantian pemimpin di suatu negara. Sementara itu, hubungan internasional dan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh individu pembuat keputusan seperti kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepribadian, persepsi, aktivitas, dan gaya kepemimpinan kepala negara mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga pemimpin yang berbeda akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda pula. Pemilihan presiden Indonesia juga diberitakan oleh media asing terutama di negara yang berhubungan baik dengan Indonesia. Sebagian khalayak di Amerika Serikat turut memperhatikan pemilihan presiden di Indonesia karena dapat berpengaruh terhadap hubungan kedua negara. New York Times sebagai media cetak dan digital yang banyak dibaca oleh pembuat kebijakan luar negeri di Amerika turut memberitakan pemilihan presiden ini. Menurut New York Times, setelah mengupas latar belakang kedua calon presiden, pemerintah Amerika harus bekerja sama dengan siapapun yang terpilih jadi presiden dan meneruskan hubungan baik dengan Indonesia.

Kata kunci: *pemberitaan media asing, kebijakan luar negeri, pemilihan presiden Indonesia*

Pendahuluan

Pada tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya yang telah berlangsung selama dua periode. Pemilu presiden 2014 akan menghasilkan presiden kedua yang dipilih oleh rakyat dan merupakan orang yang sama sekali baru. Jauh sebelum pemilu 2014, beberapa politisi terlihat berambisi untuk posisi tersebut seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, yang telah lama tidak menyembunyikan ambisinya bahkan sejak ia belum membentuk partai Gerindra; Megawati Soekarnoputri, mantan presiden Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Aburizal Bakrie, pengusaha yang juga Ketua Umum Partai Golkar; serta Wiranto dari partai Hanura yang pernah mencalonkan diri jadi presiden pada Pemilu 2004. Selain mereka, beberapa politisi melejit namanya di kancah politik nasional dan disebut-sebut sebagai calon presiden oleh publik walaupun tidak mendeklarasikan akan mencalonkan diri, seperti Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang pada awal 2014 belum dua tahun menjabat; Dahlan Iskan, Menteri BUMN, dan Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari beberapa tokoh tersebut, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Aburizal Bakrie memimpin polling yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di awal tahun 2013 (www.news.viva.co.id, www.kompas.com, www.antarane.com). Sedangkan menurut Lembaga Survei Pol Tracking Institute, Joko Widodo merupakan calon presiden terkuat (www.tempo.com). Hingga awal 2014, Jokowi dan Prabowo memimpin polling calon presiden yang diadakan oleh para lembaga survei. Akan tetapi, baru Prabowo yang mengemukakan ambisinya menjadi presiden di hadapan publik, sedangkan Jokowi diragukan akan mencalonkan diri karena Megawati sebagai Ketua Umum PDIP masih berambisi menjadi presiden. Baru pada Maret 2014 PDIP mengumumkan akan mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada pemilu yang akan diadakan 9 Juli 2014. Setelah pemilu legislatif bulan April 2014, semua partai kecuali Partai Demokrat berkoalisi dan terbagi ke dua kubu untuk mengusung kedua calon ini pada pemilu presiden 2014.

Pemilihan presiden Indonesia 2014 ini tidak hanya diberitakan oleh media nasional

tetapi juga oleh media massa di luar negeri. Hal ini disebabkan adanya kepentingan negara lain untuk bekerja sama dengan negara Indonesia, sehingga pergantian kepemimpinan di Indonesia akan berpengaruh terhadap politik dan kebijakan luar negeri. Pada dasarnya, pemberitaan tentang negara lain di media tertentu menunjukkan pentingnya negara tersebut bagi kepentingan nasional negara tempat media tersebut berada. Negara lain yang mempunyai peran dan hubungan signifikan terhadap negara tertentu akan mendapatkan *coverage* atau pemberitaan yang lebih besar dan intens dibandingkan negara lainnya yang sedikit berinteraksi dengan negara tersebut. Media sebagai penyampai pesan dan berita kepada masyarakat banyak akan menyampaikan berita yang dirasa penting dan perlu untuk pembacanya. Pemberitaan mengenai negara lain meliputi kebijakan luar negeri maupun hubungan bilateral yang dirasa perlu dengan negara tersebut. Dalam pemberitaan tentang negara lain, media adakalanya membahas tentang kebijakan luar negeri pemerintahnya terhadap negara itu, dan sikap media bersangkutan terhadap kebijakan tersebut. Dalam pemberitaan tentang pemilihan presiden Indonesia, media asing tentu telah mempertimbangkan pemilihan berita dan menganggap bahwa proses pemilihan tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Penulis tertarik untuk membahas pemberitaan tentang Indonesia di media asing, terutama Amerika Serikat yang merupakan negara adikuasa yang tentunya merupakan salah satu negara yang signifikan dalam hubungan luar negeri Indonesia. Di Amerika Serikat, seperti juga di Indonesia dan negara-negara lain, hanya sebagian kecil masyarakatnya yang memperhatikan isu hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Masyarakat pada umumnya lebih tertarik untuk membaca isu yang lebih dekat dan lebih langsung pengaruhnya terhadap kehidupan mereka, seperti politik dan ekonomi domestik. Berita luar negeri menjadi perhatian sebagian kecil masyarakat Amerika seperti pembuat kebijakan luar negeri, pejabat pemerintah urusan luar negeri, petinggi korporasi, dan kalangan berpendidikan. Mereka sering merujuk pada media massa untuk mendapatkan informasi hal-hal yang terjadi di luar negeri. Selain itu di Amerika dapat ditemukan berbagai

media yang memberikan ruang lebih pada liputan dan analisis hubungan luar negeri, sehingga memberikan banyak pilihan kepada *audience*.

Pemilihan presiden di Indonesia menjadi salah satu isu yang harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia. Kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh individu pengambil keputusan termasuk pemimpin negara seperti presiden, perdana menteri, maupun menteri luar negeri. Dengan demikian, pemilihan presiden di suatu negara biasanya akan menjadi perhatian pembuat kebijakan luar negeri di negara lain karena hubungan bilateral akan dipengaruhi oleh individu pemimpin negara. Dapat dipahami apabila pemilihan presiden di Indonesia juga menjadi perhatian pejabat pembuat kebijakan luar negeri dan pemerhati hubungan internasional di negara lain, termasuk media yang mencerminkan opini publik ataupun sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah. Pemilihan presiden di Indonesia, terutama kandidat calon dan calon presiden dibahas di media-media asing, termasuk Amerika.

Tinjauan Pustaka

Korelasi Media dan Kebijakan Luar Negeri

Pemerhati media massa dan hubungan internasional telah lama membahas tentang hubungan antara pemberitaan media dengan hubungan internasional, terutama kerja sama bilateral maupun kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Philip M. Taylor menyebutkan dalam bukunya *Global Communications, International Affairs and the Media Since 1945* (1997: 59) bahwa pengaruh antara pemberitaan media, kebijakan luar negeri serta hubungan internasional telah berlangsung sejak Perang Dunia I di mana perang bukan lagi urusan pemerintah saja melainkan juga masyarakat, yaitu pembentukan opini publik oleh media. Pada masa itu media mulai memberitakan tentang perkembangan perang dan menyiarkan pidato pemerintah yang berisi propaganda perang dan nasionalisme. Akan tetapi, media global baru mulai mendapat perhatian lebih pada tahun 1990-an ketika televisi global CNN berperan besar dalam mempengaruhi dan membawa masyarakat internasional ikut “terlibat” dalam peristiwa perang dan krisis humaniter di negara lain seperti Perang Teluk

serta krisis di Somalia dan Bosnia dengan menyiarkan pemberitaan intensif tentang perang tersebut. Hal ini menimbulkan istilah baru yaitu “*CNN effect*” yang mencerminkan hubungan kuat antara media, kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, serta opini publik internasional.

Berbagai penelitian juga telah mengakui pengaruh media dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri. *CNN effect*, walaupun masih diperdebatkan definisi dan pengaruhnya, diyakini menjadi bukti kaitan antara media global dengan hubungan internasional. Pemberitaan Perang Teluk pada tahun 1990-an membuka mata dunia tentang korelasi media massa dengan hubungan internasional, khususnya hubungan antara pemberitaan media dengan pembuatan kebijakan luar negeri (Gilboa, *Political Communication*, 2005: 28). Bagaimana bentuk korelasi tersebut masih diperdebatkan oleh para akademisi sehingga terdapat pendekatan dan pandangan yang berbeda-beda.

Terdapat dua pendekatan utama dalam pembahasan tentang hubungan media dengan kebijakan luar negeri, yaitu tesis *manufacturing consent* dan tesis *CNN effect*. *Manufacturing consent* merupakan tesis yang dikemukakan oleh Chomsky dan Herman (dalam Balabanova, 2007: 3) yang menyatakan bahwa pembuatan kebijakan adalah hak istimewa para elit, sementara media, yang statusnya di bawah pemerintah, “diarahkan” oleh pemerintah. Hal ini berarti pemberitaan media dipengaruhi oleh pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas berita. Dengan demikian, pemberitaan tentang kebijakan luar negeri oleh media juga mengikuti kemauan elit karena media dituntun untuk mengikuti isu tersebut sesuai dengan kepentingan elit politik. Apabila terdapat pemberitaan kritis terhadap suatu kebijakan pemerintah, maka hal tersebut dapat terjadi karena adanya pro dan kontra antara elit politik akan isu tersebut (Hallin dalam Balabanova, 2007: 4).

CNN effect merupakan teori yang menyatakan sebaliknya; menurut penteorinya ini beritalah yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Akan tetapi masih terdapat perdebatan tentang definisi *CNN effect*. Sebagian akademisi menyebutkan bahwa pemberitaan media memang berpengaruh terhadap pembuatan ke-

bijakan; atau adanya perlombaan antara pemberitaan *real-time* media dengan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, tetapi media tetap menjadi pihak yang lebih mempengaruhi. Pandangan lain mengemukakan tentang perlunya pemerintah untuk merespon isu-isu hubungan internasional maupun tanggung jawab media sebagai kontrol politik yang harus menentukan “*agenda setting*” sebagai tanggung jawabnya terhadap publik (Balabanova, 2007:5-6).

Hal ini menyebabkan para pemerintah negara menyadari pentingnya pemberitaan negaranya di media asing terutama di negara di mana mereka mempunyai hubungan bilateral yang penting. Para diplomat dan pemerhati hubungan internasional dan politik luar negeri harus memperhatikan pemberitaan tentang negara mereka di luar negeri. Bahkan di Amerika Serikat mulai bermunculan perusahaan humas yang menawarkan jasa dalam membentuk citra atau gambaran negara asing tertentu di tengah-tengah masyarakat dengan menyusun *agenda setting* di media. Perusahaan humas ini dikotrak oleh negara lain untuk membentuk citranya di media dan masyarakat Amerika. Contohnya antara tahun 1974 dan 1978 sejumlah 25 negara, termasuk Indonesia, mengontrak perusahaan humas Amerika untuk membentuk citra mereka di media lokal (Manheim and Albritton, APSA, 1984: 646, 649).

Pemberitaan tentang aktor internasional seperti negara lain di media massa sangat mungkin untuk tidak akurat bahkan dimanipulasi, karena beberapa alasan. Individu warga negara jarang yang bersentuhan langsung dengan aktor internasional seperti negara dan pemerintahan lain, sehingga gambaran tentang mereka sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Selain itu, media mempunyai sumber daya yang terbatas untuk peliputan hubungan internasional, apalagi *audience* mempunyai ketertarikan yang rendah terhadap hal tersebut. Terakhir, pejabat pemerintah pun sulit untuk mengumpulkan data tentang negara lain sehingga pada akhirnya bergantung pada informasi yang didapat dari media (Manheim and Albritton, APSA, 1984: 643).

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian publik terhadap isu kebijakan luar negeri dan hubungan internasional sangatlah

kecil. Walaupun dunia sudah lebih terintegrasi dengan adanya jaringan televisi global dan internet, di mana peristiwa di tempat yang jauh cepat menyebar melalui media massa dan berikutnya dapat mempengaruhi kehidupan di negara lain, *audience* yang membaca dan menonton berita luar negeri dan hubungan internasional tetap sedikit. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya sumber daya yang dikerahkan oleh media cetak maupun elektronik untuk meliput berita internasional, selain akibat biayanya yang mahal. Selain itu, dapat dilihat bahwa media yang memberikan proporsi yang lebih pada isu hubungan internasional tidak mampu berbuat banyak untuk menambah *audience*. Sedangkan media yang mengkhususkan pada peliputan dan analisis tentang hubungan internasional mempunyai jumlah *audience* yang sedikit, yang dapat dikatakan *niche product, niche audience* (Taylor, 1997: 72).

Oleh sebab itu pemberitaan tentang hubungan internasional khususnya tentang negara lain cenderung memiliki tingkat keakuratan terbatas. Media biasanya bergantung pada koresponden asing untuk mendapatkan berita luar negeri, di mana koresponden tersebut pun meliput beberapa negara dalam suatu kawasan sekaligus. *Audience* mendapatkan gambaran tentang berita dari negeri yang jauh yang tidak pernah mereka lihat sama sekali, sehingga gambaran mereka sangat tergantung dari gambaran yang diberikan media. Hal ini menyebabkan pandangan masyarakat, bahkan yang rajin membaca dan mencari informasi tentang negara tertentu, kerap tidak persis dengan yang aslinya.

Pada masa teknologi informasi ini, di mana setiap orang dapat mengakses internet di mana saja dengan gadget mereka, peran televisi berkurang dalam menjadi sumber informasi bagi pengambil keputusan. Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Human Rights Watch dan School of International and Public Affairs Universitas Columbia pada tahun 2012, ditemukan bahwa sebagian besar pembuat kebijakan luar negeri Amerika menyebutkan *New York Times* sebagai media yang paling sering dibaca dan digunakan sebagai rujukan sumber informasi berita luar negeri. Selain itu, pembuat kebijakan luar negeri dengan spesialisasi kawasan tertentu merujuk pada media seperti blog dengan tema khusus kebijakan luar

negeri yang temanya dibagi per kawasan. Blog yang paling populer digunakan yaitu ForeignPolicy.com. Para pembuat keputusan ini menyebutkan walaupun di kantor mereka televisi sering memutar CNN, jarang yang memperhatikan, dan baru benar-benar menon-ton berita ketika berkaitan dengan yang mereka bahas dalam rapat (Columbia SIPA & HRW, 2012: 3, 17, 22).

Individu sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal *levels of analysis*, yaitu analisis yang berdasarkan pada beberapa level atau tingkatan faktor yang dapat menjadi alasan diputuskannya suatu kebijakan luar negeri. Kategorisasi ini pertama kali digunakan oleh Kenneth Waltz dan dipopulerkan oleh J. David Singer. Walaupun pendekatan ini bisa meliputi beberapa level analisis, yang paling umum digunakan yaitu tiga level atau tiga faktor yang mempengaruhi politik luar negeri, yaitu level individu, negara, dan sistem internasional (Mingst, 1999: 63, 66).

Individu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri terutama para pemimpin dan pembuat kebijakan. Pemimpin sebuah negara mempengaruhi bentuk hubungan internasional yang tercipta. Kepribadian pemimpin, persepsi, aktivitas, dan pilihan pemimpin tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri sehingga akan berbeda jika dilakukan oleh pemimpin dengan karakter dan gaya kepemimpinan yang berlainan (Mingst, op cit: 64). Pemimpin diktator misalnya, cenderung melakukan agresi militer atau ekspansi ataupun menimbulkan konflik dengan negara lain, seperti Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler, Saddam Hussen yang menginvasi Kuwait pada Perang Teluk, serta Korea Utara dari masa pemerintahan Kim Jong Il hingga Kim Jong Un yang masih ber-konflik dengan Korea Selatan.

Pada tingkat negara, kepentingan nasional sangat menentukan mengapa suatu negara melakukan tindakan tertentu dalam hubungan internasional atau mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengambil suatu kebijakan luar negeri tertentu. Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk terlibat dalam Perang Dunia II karena Jerman hampir menguasai Eropa Barat. Amerika memutuskan untuk terlibat langsung dalam perang, tidak

hanya membantu Inggris dalam persenjataan, karena khawatir Jerman akan menguasai Inggris dan selanjutnya akan mudah bagi Jerman untuk menyerang Amerika. Selain itu bentuk negara juga mempengaruhi kebijakan luar negeri, apakah bentuk negara tersebut demokratis atau otoriter, maupun bentuk sistem ekonomi seperti kapitalis atau sosialis (Mingst, op cit: 64-65).

Pada tingkat sistem internasional, kondisi politik dunia juga mempengaruhi tindakan suatu negara dalam hubungan internasional. Hal ini terlihat jelas pada masa Perang Dingin di mana dunia terbagi ke dalam dua blok yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Sovyet. Ketegangan antara Amerika dan Uni Sovyet mempengaruhi negara-negara lain di hampir seluruh dunia karena kedua negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya untuk menyaingi kubu lawan. Walaupun tidak pernah terlibat dalam perang fisik, Amerika dan Uni Sovyet selalu mendukung negara-negara yang sedang terpecah antara liberalisme dengan komunisme.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin negara akan sangat mempengaruhi politik dan kebijakan luar negeri dan juga mempengaruhi posisi negara tersebut dalam hubungan internasional. Dapat dipahami juga tindakan pembuat kebijakan luar negeri yang selalu mengamati pergantian kepemimpinan di negara lain karena akan mempengaruhi hubungan dengan negara tersebut serta mempengaruhi kepentingan nasional. Oleh sebab itu tidak jarang media memberitakan pemilihan presiden atau kepala negara di negara lain terutama apabila negara lain tersebut sangat penting dalam hubungan luar negeri negara di tempat media tersebut berada.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif terhadap pemberitaan media massa di Amerika tentang pemilu presiden Indonesia tahun 2014. Media yang dipilih yaitu *New York Times* karena merupakan media yang paling banyak dibaca oleh pembuat kebijakan luar negeri di Amerika. Versi digital dari koran ini, www.nytimes.com, dipilih karena pada saat ini pembaca koran di Amerika banyak yang beralih ke situs koran tersebut, termasuk pembuat kebijakan luar negeri (Colombia SIPA & HRW: 21). Selain itu, NYT telah menjadi bacaan

dominan para pembuat kebijakan tersebut sejak lama. Media televisi seperti CNN, walaupun pernah dianggap sebagai salah satu media penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, malah tidak selalu ditonton oleh para pembuat kebijakan tersebut pada era digital ini, sehingga penulis tidak menganalisa media televisi.

Berita yang dipilih yaitu dari Januari 2014 ketika Indonesia mulai sibuk mempersiapkan pemilihan presiden, hingga 9 Juli 2014 yaitu hari pemilihan. Berita dipilih dengan memasukkan kata kunci "*Indonesian presidential election 2014*" dan kemudian dipilih berita yang memuat peristiwa pemilu presiden dengan signifikan, termasuk artikel tentang kedua kandidat calon presiden. Pencarian ini menghasilkan tujuh artikel yang berkaitan dengan pemberitaan pemilihan presiden dan kedua kandidat calon presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Hasil dan Pembahasan

Pencarian berita di situs www.nytimes.com dengan kata kunci "*Indonesian presidential election*" menghasilkan tujuh artikel tentang pemilu presiden yaitu:

1. *Governor of Jakarta Receives His Party's Nod for President*, pada tanggal 14 Maret 2014.
2. *Indonesia Candidate Tied to Human Rights Abuses Stirs Unease*, pada tanggal 27 Maret 2014.
3. *Early Count in Indonesia Favors Largest Opposition Party*, pada tanggal 9 April 2014.
4. *Political Upstarts Work to Propel Change in an Indonesia Tired of Corruption*, pada tanggal 21 Juni 2014.
5. *After Barrage of Personal Attacks, Indonesian Presidential Election Tightens*, pada tanggal 5 Juli 2014.
6. *Indonesian Candidate Masters a System He Is Said to Disdain*, pada tanggal 7 Juli 2014.
7. *Populist Hopeful Says He's Likely Winner in Indonesia, Defeating Ex-General*, pada tanggal 9 Juli 2014.

Ketujuh artikel tersebut memberitakan tentang pemilu presiden dan kedua calon presiden. Mereka dapat dikelompokkan menurut fokus dan cara pembahasan dalam masing-

masing artikel. Artikel 1, 2, 6, dan 7 membahas tentang calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo; artikel 4 membahas tentang kecenderungan kepemimpinan baik lokal maupun nasional di Indonesia yang memulai perubahan ke arah pemerintahan yang bersih, dengan salah satu contoh Gubernur DKI Joko Widodo sehingga juga membahas pencalonannya sebagai presiden Indonesia; artikel 3 memberitakan tentang pemilu legislatif di Indonesia yang juga membahas tentang calon presiden dari masing-masing partai; dan artikel 5 membahas tentang kegiatan masa kampanye menjelang pemilu presiden yang penuh dengan serangan pemberitaan negatif dari masing-masing kubu.

Artikel pertama memberitakan tentang dipilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang memposisikan dirinya sebagai partai oposisi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2004 hingga 2014. Setelah menyebutkan tentang pemilihan tersebut pada paragraf *heading* atau beberapa paragraf awal yang mencerminkan inti berita, *background information* (informasi penopang inti berita) membahas tentang spekulasi pencalonan Jokowi menjadi calon presiden dari PDIP telah berlangsung lebih dari setahun lamanya. Spekulasi tersebut terjadi karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga mantan presiden, tampak masih berambisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden, akan tetapi polling memperkirakan ia hanya akan menempati posisi ketiga setelah Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal. Di sisi lain, Jokowi sering mendapatkan polling tertinggi, melebihi Prabowo Subianto, dalam bursa calon presiden.

Artikel kedua membahas tentang calon presiden Prabowo Subianto dan bagaimana rekam jejaknya di masa lalu membuat khawatir aktivis HAM. Artikel dibuka dengan menggambarkan cara Prabowo berkampanye di stadium Gelora Bung Karno dengan gaya militer, dan bahwa gaya militer tersebut tetap digunakan walaupun karir militernya ternoda oleh kasus pelanggaran HAM, karena Indonesia dilihat sebagai negara yang membutuhkan pemimpin yang kuat. Artikel tersebut juga cukup banyak membahas tentang hubungan

Prabowo dengan Amerika. Dimulai dengan latar belakang pendidikan militer Prabowo di Amerika, Prabowo disebut “pemuja” Amerika. Prabowo digambarkan telah berusaha berkali-kali untuk bertemu dengan diplomat Amerika namun tidak tercapai. Selain itu juga disebutkan tentang penolakan visa Prabowo ke Amerika pada tahun 2000 untuk alasan yang tidak jelas. Artikel tersebut juga membahas tentang sejarah tuduhan keterkaitan Prabowo dalam kasus HAM di Indonesia mulai dari pembantaian di Timor-Timur pada tahun 1980-an hingga penangkapan aktivis pada reformasi tahun 1998. Akan tetapi, artikel tersebut tidak menyebutkan bahwa penolakan pejabat Amerika untuk bertemu Prabowo dan penolakan visanya adalah akibat dari sejarahnya dengan kasus HAM di Indonesia. Disebutkan bahwa beberapa diplomat telah bertemu dengan adiknya yang pengusaha, serta beberapa pejabat tingkat rendah pernah bertemu dengan orang-orang terdekat Prabowo, walaupun tidak dengan Prabowo sendiri.

Artikel tersebut juga memperkirakan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika apabila Prabowo terpilih. Menurut artikel tersebut, Duta Besar Amerika di Indonesia Robert O. Blake menyatakan Amerika siap bekerja sama dengan Indonesia siapapun yang akan terpilih sebagai presiden. Pejabat Amerika percaya bahwa Prabowo tetaplah pendukung Amerika walaupun ia menampakkan sikap dingin. Kebijakan ini dibandingkan dengan kebijakan Amerika yang bersedia menemui Narendra Modi, calon kuat presiden India yang juga pernah ditolak visa masuk Amerika karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan dengan kekerasan di Gujarat tahun 2005. Amerika diperkirakan akan bersikap pragmatis, seperti menghadapi Modi, apabila Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia dan tidak akan menindaklanjuti tuduhan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM.

Artikel ketiga memberitakan tentang hasil hitung cepat pemilu legislatif Indonesia yang memperlihatkan kemenangan PDIP yang merupakan partai oposisi. Hasil ini dianggap sebagai hasil yang lumayan, mengingat PDIP tidak pernah menjadi partai dengan suara tertinggi sejak pemilu tahun 1999, namun tetap memberikan kekecewaan pada partai tersebut karena mereka menargetkan 30 persen suara.

Selain itu, masih belum pasti apakah PDIP dapat mengajukan calon presidennya, Joko Widodo, tanpa berkoalisi dengan partai lain karena diperlukan lebih dari 20 persen suara untuk itu. Hasil hitung cepat menunjukkan perolehan suara PDIP sekitar 19 hingga 20 persen. Di artikel ini juga disebutkan Jokowi dan PDIP siap untuk bekerja sama dengan partai lain tetapi tidak mau menyebutnya “koalisi” karena terdengar seperti pembagian kekuasaan. Setelah itu dibahas mengenai lawan berat Jokowi di pemilu presiden yaitu Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal yang menuai kritik karena adanya rekam jejak pelanggaran HAM pada saat di militer, namun mengemukakan program kesejahteraan rakyat bawah, kebijakan ekonomi proteksionis, dan kepemimpinan yang tegas, berbeda dengan Jokowi yang digambarkan sebagai pemimpin populis. Melihat hasil hitung cepat pemilu tersebut, partai pengusung Prabowo yaitu Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain karena Gerindra berada di posisi ketiga dengan suara sekitar 12 %.

Artikel keempat menceritakan tentang kecenderungan baru pemimpin-pemimpin daerah di Indonesia yang masih muda dan membawa pembaruan dengan semangat melayani rakyat dan menghapuskan tradisi korupsi yang dibawa oleh Orde Baru. Artikel dimulai dari kisah Bima Arya Sugiarto, walikota Bogor, yang memfokuskan pada kebijakan layanan kesehatan dan pendidikan, serta menegaskan pandangan bahwa walikota adalah pegawai negeri yang melayani rakyat, bukan penguasa. Kecenderungan kepemimpinan ini merupakan tren baru yang terinspirasi oleh Walikota Surakarta Jokowi yang juga menjadi kandidat kuat presiden. Para pemimpin muda ini mendorong *good governance* dan tidak toleran terhadap korupsi yang diperlihatkan dengan interaksi langsung dengan masyarakat di jalanan serta mengadakan pertemuan massal. Mereka juga independen dari partai dan pemimpin di tingkat nasional yang masih dikuasai oleh politisi yang telah berkecimpung pada politik Orde Baru. Apabila berhasil menjalankan pemerintahan transparan, terbuka, anti korupsi dan berintegritas, serta terpilih untuk dua periode jabatan, maka mereka dapat menarik perhatian partai di tingkat nasional. Tren ini dianggap akan menguat apabila Jokowi terpilih menjadi presiden, apalagi mengalahkan calon

presiden Prabowo Subianto yang merupakan mantan jendral dan mantan menanatu Presiden Soeharto. Perjalanan politik Jokowi dianggap sebagai contoh bagi para pemimpin ini, mulai dari walikota kota kecil Surakarta, hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia tetap menunjukkan cara pendekatan langsung pada rakyat dan mengusung program layanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga membuat terkesan media lokal. Akan tetapi tren ini tidak diharapkan untuk langsung menyingkirkan elit politik yang terhubung dengan era Soeharto, apalagi tim kampanye Jokowi juga meliputi politisi yang muncul setelah jatuhnya Soeharto.

Artikel kelima memberitakan tentang kampanye calon presiden yang sarat dengan serangan tuduhan negatif dan fitnah, disebabkan hanya ada dua calon presiden dan berita-berita miring tersebut dianggap dapat mempengaruhi *swing voters*, yaitu pemilih yang tidak mengafiliasikan diri pada partai dan aliran tertentu sehingga belum menentukan pilihan hingga hari pemilihan datang. Artikel tersebut menggambarkan Prabowo sebagai mantan Jenderal yang didukung oleh kelas menengah dan atas yang berada di kota-kota besar, walaupun mempunyai rekam jejak dugaan pelanggaran HAM selama karir militernya. Jokowi, disebutkan sebagai mantan walikota yang tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan otoriter Indonesia, mempunyai basis pemilih di daerah pedesaan dan mendapatkan suara terbanyak dalam poling calon presiden. Artikel ini mengutip pendapat para analis yang menganggap bahwa kampanye hitam menyebabkan suara Jokowi, yang telah mendapatkan suara terbanyak selama beberapa bulan terakhir, turun beberapa poin sehingga jarak antara suara Prabowo dan Jokowi semakin menipis. Artikel tersebut kemudian menceritakan tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan pada masing-masing kandidat pada saat kampanye hitam, seperti Jokowi yang keturunan Tionghoa dan dulunya beragama Kristen. Hal inilah yang terutama mempengaruhi pemilih Islam sehingga beralih. Di sisi lain, Prabowo disebut sebagai psikopat dan tidak lulus tes kesehatan mental sewaktu di Kopasus, berlawanan dengan penampilannya di publik yang selalu tampak cerdas. Artikel lalu menyebutkan tentang kampanye yang diusung Jokowi yaitu melawan

korupsi dan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan; sedangkan Prabowo lebih fokus pada nasionalisme, investasi asing yang lebih menguntungkan Indonesia, proyek pembangunan yang rinci, dan kepemimpinan yang tegas.

Artikel keenam kurang lebih juga menceritakan tentang perbandingan antara kampanye Prabowo dan Jokowi serta kampanye hitam, namun dimulai dengan hasil poling yang menunjukkan peningkatan suara Prabowo. Prabowo sekali lagi digambarkan menarik perhatian publik dengan kampanye nasionalis dan janji akan kepemimpinan yang tegas, yaitu dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, proyek pertanian, dan ketegasan terhadap kepentingan asing yang menguras sumber daya alam Indonesia, sedangkan Jokowi menjanjikan pemerintahan yang lebih populis (*people-centric*) dan pro rakyat miskin dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Artikel tersebut juga membandingkan gaya kampanye keduanya, yaitu Prabowo berkampanye di stadion di hadapan pendukungnya yang kelas menengah atas dengan gaya militer menaiki kuda putih, sedangkan Jokowi berkampanye di pesantren dan pasar tradisional yang selalu dipadati kelas pekerja Indonesia yang menarik-narik bajunya. Selanjutnya dibahas bahwa kedua kandidatpun saling menyindir berdasarkan perbedaan mereka yang sangat mencolok. Artikel tersebut juga membahas tentang berbagai rumor yang dilemparkan tentang kedua kandidat sebagai bentuk kampanye hitam.

Artikel ketujuh yang terbit pada hari pemilu, beberapa jam setelah pemilu presiden, memberitakan optimisme Jokowi memenangkan pemilu presiden berdasarkan hasil hitung cepat pemilu presiden, sedangkan Prabowo, menyatakan bahwa hasil tersebut terlalu dini untuk melihat pemenang. Jokowi mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga poling independen yang juga memperkirakan hasil pemilu legislatif sebelumnya dengan akurat. Prabowo menolak untuk mengakui kekalahan dengan mengacu pada lima lembaga poling yang kurang terkenal yang menyatakan bahwa ialah pemenangnya. *Background information* artikel ini yaitu janji kampanye kedua calon serta tuduhan-tuduhan yang dilemparkan pada

mereka pada masa kampanye. Pemilu ini digambarkan sebagai pertarungan antara dua kelompok berbeda yaitu antara masyarakat miskin dan kaya serta pilihan antara tokoh perubahan dan figur dari masa lalu Indonesia yang otoriter. Untuk menguatkan gambaran ini, artikel tersebut mengutip beberapa masyarakat yang menyatakan alasan memilih masing-masing calon tersebut.

Dari penjabaran isi artikel di atas, dapat dilihat bahwa media Amerika menganggap bahwa pemilu presiden Indonesia merupakan berita yang *newsworthy* untuk publik Amerika. Bisa dikatakan bahwa publik Amerika, terutama kalangan tertentu yang berkepentingan dengan hubungan bilateral Amerika dengan Indonesia, menganggap penting pemilu presiden Indonesia. Pemilihan presiden Indonesia, begitu juga para kandidatnya, menjadi perhatian karena akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Pemberitaan pemilu presiden Indonesia 2014 oleh New York Times dapat dibagi menurut fokus pemberitaannya yaitu; (a) fokus pada peristiwa sekitar proses pemilu, seperti kampanye hitam yang marak menjelang pemilu; (b) fokus pada latar belakang dan karakter kedua calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto; (c) selain itu, ada beberapa berita yang pada intinya fokus pada hal lain seperti pemilu legislatif dan tren kepemimpinan reformis tetapi juga berkait dengan pemilu presiden maupun salah satu calon presiden. Dalam pemberitaan tersebut dapat disimpulkan beberapa isu pokok yang disorot New York Times yaitu:

1. Pemilu presiden Indonesia cukup intens karena terdiri atas hanya dua kandidat yang baru kali ini terjadi di Indonesia, sehingga terjadi kampanye hitam yaitu serangan tuduhan negatif dan kritik keras kepada kedua calon terkait latar belakang dan pandangannya.
2. Pemilu ini dianggap merepresentasikan dua kelompok yang kontras yaitu kelompok kelas menengah atas yang mendukung Prabowo dengan janjinya kepemimpinan yang tegas dan nasionalis serta memajukan pertanian; dan kelompok kelas bawah yang mendukung Jokowi dengan janji kampanyenya pemerintahan yang populis, fokus pada manusia (*people-centric*) dan perbaikan

kesejahteraan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

3. Latar belakang dan rekam jejak kedua calon yang berbeda. Jokowi digambarkan sebagai pemimpin populis yang dekat dengan rakyat dan tidak terlibat dalam elit politik masa lalu yang otoriter dan korup, sedangkan Prabowo digambarkan merupakan mantan jenderal di masa Orde Baru, di mana ia juga mantan menantu Soeharto, yang menunjukkan kepemimpinan tegas dan rekam jejaknya yang terkait tuduhan pelanggaran HAM. Sebelum resmi menjadi calon presiden 2014, kedua tokoh ini tidak asing bagi media Amerika ini. Prabowo telah lama dikenal di Amerika terkait tuduhan pelanggaran HAM semasa karir militernya serta pernah ditolak visa masuk Amerika. Walaupun New York Times tidak menyatakan bahwa penolakan visa Prabowo berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM, banyak pihak yang percaya bahwa hal tersebut berhubungan; yaitu penolakan visa Prabowo karena pemerintah Amerika mengkhawatirkan kritik dari aktivis HAM di negara tersebut (<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/01/269581625/Prabowo-Ditolak-Masuk-AS-Hashim-Tak-Cuma-Prabowo>). Jokowi baru beberapa tahun belakangan dibahas di media Amerika yaitu sejak ia menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan pendekatan *people-centric*-nya dan kemungkinannya menjadi calon presiden Indonesia.
4. Kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia apabila dipimpin oleh kedua calon tersebut. New York Times secara umum menyebutkan bahwa hubungan kedua negara tidak akan berubah dan Amerika akan menerima dengan baik siapapun yang menjadi Presiden, bahkan Amerika diharapkan bersikap pragmatis apabila Prabowo menjadi presiden yaitu tidak akan meneruskan tuduhan pelanggaran HAM Prabowo. Hal ini dimungkinkan karena para analis percaya bahwa Prabowo merupakan pendukung Amerika, terlihat dari latar belakang pendidikannya di Amerika dan usahanya sejak lama untuk berinteraksi dengan para diplomat Amerika.

Dari empat poin di atas dapat dilihat bahwa New York Times menjabarkan secara eksplisit maupun implisit tentang pengaruh

pemilu Indonesia terhadap hubungan bilateral Amerika dan Indonesia. Secara eksplisit, *New York Times* membahas kemungkinan hubungan Amerika dan Indonesia apabila Indonesia dipimpin oleh Prabowo. Secara implisit, pemilu presiden yang akan memilih presiden Indonesia merupakan gambaran penting tentang bagaimana kecenderungan pilihan masyarakat dan menentukan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Selain itu, secara tidak langsung dapat dilihat dan dianalisis dari proses pemilu tersebut keinginan dan aspirasi masyarakat, pemimpin seperti apa yang diinginkan rakyat Indonesia, dan secara sekilas dapat dilihat aspirasi masyarakat Indonesia tentang hubungan luar negeri, yaitu sebagian masyarakat yang menginginkan politik luar negeri yang lebih tegas di bawah kepemimpinan Prabowo.

Simpulan

Pemberitaan pemilihan presiden Indonesia di *New York Times* memperlihatkan korelasi pemberitaan media dengan hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri. Pentingnya peristiwa politik seperti pergantian kepemimpinan membuat media luar berkepentingan untuk memberitakan. *New York Times* memilih memberitakan pemilihan presiden Indonesia karena penting untuk publik Amerika terutama yang membuat kebijakan luar negeri maupun pengamat dan akademisi.

Dalam pemberitaan, *New York Times* juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik dengan mengemukakan pandangan dan opininya sendiri terhadap suatu peristiwa. Pandangan *New York Times* yaitu bahwa siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia, Amerika harus siap pragmatis dan bekerja sama dengan presiden Indonesia yang baru. *New York Times* tidak membahas hubungan bilateral Amerika-Indonesia apabila Jokowi terpilih karena Jokowi tidak membahas politik luar negeri pada janji kampanyenya. *New York Times* menyatakan hubungan Amerika-Indonesia tetap akan baik apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, walaupun pernah ditolak bertemu diplomat Amerika maupun ditolak visa masuk Amerika dan sejarah tuduhan pelanggaran HAM pada masa lalunya. Dapat dilihat bahwa pada masa sekarang, dengan tidak adanya perang dunia, negara-negara cenderung berada dalam kondisi

damai dan memilih bekerja sama dibandingkan berkonflik, sehingga pergantian kepemimpinan tidak akan merubah drastis suatu hubungan bilateral dari damai menjadi perang ataupun sebaliknya. Namun demikian, perubahan pastinya ada, bila dilihat dari segi karakter maupun gaya maupun tipe kepemimpinan, sehingga penyesuaian tetap diperlukan. Media massa memainkan peran penting dalam memberikan informasi calon pemimpin-pemimpin di negara lain untuk mempersiapkan kebijakan luar negeri terhadap negara tersebut.

Daftar Rujukan

Balabanova, Ekaterina. 2007. **Media, Wars, and Politics: Comparing the Incomparable in Western and Eastern Europe.** Hampshire: Ashgate.

Columbia School of International and Public Affairs and Human Rights Watch. 2012. **U.S. Foreign Policy Makers and the Media: Where and How Decision Makers Get Their Information.** A report by: Yotam Amit—Asha Castleberry—Michelle Chahine—Mary Han—Rasha Kashkoush—Emily Richards—Matt Schiavenza. Spring.

Gilboa, Eytan. 2005. *The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations.* **Political Communications, Vol. 22,** pp. 27-44.

Hasil Survei Sejumlah Lembaga Soal Capres 2014, 11 Februari 2014, Viva News. <http://politik.news.viva.co.id/news/read/480355-hasil--survei-sejumlah-lembaga-soal-capres-2014>, diakses pada 1 Juni 2014.

Kashkoush—Emily Richards—Matt Schiavenza. 2012. **Faculty Advisor: Michael Cowan.** Spring. Columbia School of Public Relations and Human Rights Watch

Manheim, Jarol B. and Robert B. Albritton. 1984. *Changing National Images: International Public Relations and Media Agenda Setting.* **The American Political Science Review, Vol. 78, No. 3,** Sep., pp. 641-657.

Megawati, Ical, dan Prabowo Kandidat Kuat Capres 2014 Versi LSI, 17 Maret 2013, Kompas

Pemilihan Presiden Indonesia 2014 ...

<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/17/14254291/Megawati.Ical.dan.Prabowo.Kandidat.Kuat.Capres.2014.Versi.LSI>
diakses pada 1 Juni 2014.

Mingst, Karen. 1999. **Essentials of International Relations**. New York: W. W. Norton & Company.

Survei: empat kandidat capres terkuat dari

nasionalis, 17 Maret 2013, antaranews
<http://www.antaranews.com/berita/363678/survei-empat-kandidat-capres-terkuat-dari-nasionalis>, diakses pada 1 Juni 2014.

Taylor, Philip M. 1997. **Global Communications, Internal Affairs and the Media Since 1945**. New York; Routledge.